

**UPAYA DIPLOMASI KOERSIF INDIA DALAM KONFLIK  
SENGKETA WILAYAH KASHMIR TAHUN 2012-2018**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh :

**Ummu Masyithotul Khoiriyah**

**15323036**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**UPAYA DIPLOMASI KOERSIF INDIA DALAM KONFLIK**

**SENGKETA WILAYAH KASHMIR TAHUN 2012-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional.

Pada Tanggal

13 JAN 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

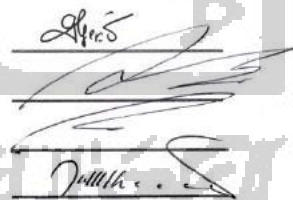
Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
4. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.



## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ummu Masyithotul Khoiriyah

NIM : 15323036

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Diplomasi Koersif India Dalam Konflik Sengketa Wilayah Kashmir Tahun 2012-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

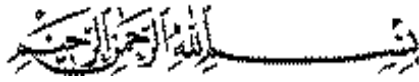
1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, sepele penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Januari 2020



Ummu Masyithotul Khoiriyah

## KATA PENGANTAR



Ahamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan dan anugerah-Nya yang tiada terkira, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada uswatun khasanah kita Nabi Muhammad SAW yang bersamanya kemuliaan dan keagungan Islam. Skripsi dengan dengan judul “Upaya diplomasi koersif India dalam konflik sengketa wilayah Kashmir tahun 2012-2018” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materi maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Abah dan Ibuk, Bapak dan Ibu pengasuh pesantren, dan seluruh keluarga besar yang kucintai, atas tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Wili Ashadi, S.HI., M.A selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, motivasi, bantuan, dukungan serta waktu yang diberikan kepada saya selama proses penulisan skripsi. Semoga Bapak selalu dimudahkan segala urusannya dan Allah SWT memberkahi segalanya.

4. Ibu Karina Utami Dewi S.IP., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat berperan besar terhadap dinamika perkuliahan saya.
5. Bapak Hangga Fathana, S.IP.. B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D., Bapak Ganjar Widhiyoga S.IP., M.Si., Ph.D., serta seluruh dosen HI UII. Terimakasih atas semua ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasehat yang tak terhingga sehingga membuat saya mampu berproses hingga sampai di titik sekarang ini. Semoga senantiasa Allah memberkahi dan memudahkan segala urusan bapak dan Ibu dosen.
7. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas segala bantuan administrasi akademik yang diberikan selama saya menjadi mahasiswa.
8. Adik-adikku Hanivia Husna Basiroh dan Muhammad Luthfi Rozan yang menjadi teman ribut setiap berkumpul. Semoga kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah yang mampu menjadi wasilah kesuksesan dan kebahagiaan orang tua di dunia dan akherat. Semangat menuntut ilmu, semoga kelak menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kawan seperjuangan HI UII khususnya angkatan 2015, yang telah berperan besar dalam pembentukan karakter dan berproses bersama, banyak pelajaran

bagaimana untuk menjadi dan bersikap dewasa. Semoga kelak kita akan sukses bersama.

10. *Daar El Salam Squad* asrama Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek V yang menjadi teman hidup selama di Jogja. Semoga kita semua menjadi perempuan yang solehah, kelak menjadi seorang istri dan ibu di masa mendatang.
11. Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) terima kasih organisasiku, seluruh keluargaku atas segala dukungan, ilmu dan doanya yang berhasil mendewasakanku atas segala proses yang kita lalui bersama. Semoga dimanapun kita berada, tetap mampu untuk mengabdikan dan melestarikan ajaran *sunnah wal jama'ah*.
12. Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHU) sungguh bangga dan terima kasih telah menjadi bagian dari tempatku mengabdikan untuk almamater dan masyarakat.
13. Woro Qisthi, Galih Putri, Helfina Yusuf, Mita Jumiatus, dan Sopheeyah Sani. Kalian *the best sister, human diary, best friend*, teman nongkrong dan begadang, teman susah dan senang. Apapun itu, kalian spesial buatku. Terima kasih sudah menerimaku dan menjadi bagian dari perjalanan hidupku, aku banyak belajar tentang kehidupan dengan kalian. Semoga kita bisa berkarya dan sukses bersama di masa depan.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan bantuan dan berkontribusi dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir.

15. Terlepas dari segala bantuan eksternal, pihak internal menjadi elemen sangat penting dalam segala proses. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang selama ini mampu bekerjasama dengan baik, pola tidur yang kacau. Mari kita perbaiki diri dan tingkatkan kerja sama untuk merajut masa depan yang indah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, Januari 2020



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang yang Engkau berikan disetiap langkahku. Terima kasih Ya Allah atas segala kebahagiaan dan kenikmatan yang Engkau hadirkan dalam hidupku

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW

Karya sederhana ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang sangat kucintai dan yang kusayangi. sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih kepada mereka

**“Kedua orang tuaku tersayang”**

Teruntuk Ibu dan Abah, terima kasih atas segala cinta kasih, doa, bimbingan, dan kerja keras yang tak pernah putus. Dukungan secara moral dan materi yang tak terbatas membuatku mampu berproses untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan kelak menjadi pelita hati seperti harapan kalian di masa depan. Semoga ini menjadi langkah awal anakmu dalam mewujudkan mimpi dan membahagiakanmu di dunia dan akherat

Semua keluarga, sahabat dan teman-teman yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan yang selalu ada di suka dan dukaku

**“Almamaterku Universitas Islam Indonesia”**



## HALAMAN MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Sesungguhnya**

**sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

**“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”**

(HR. Ath-Thabrani. Al-Mu’jam al Ausath, Juz VII, hal. 58)

**“Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Bermimpilah setinggi**

**langit. Jika**

**engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”**

(Ir. Soekarno)

**“Nobody's perfect, let's improve and make it special. Sertakan doa & restu**

**orang tua dalam setiap langkahmu”**

(Ummu Masyithotul Khoiriyah)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikansi Penelitian.....	6
1.5 Cakupan Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka.....	8
1.7 Landasan Konseptual.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.3 Subjek Penelitian.....	15
<b>BAB II DINAMIKA KONFLIK SENGKETA WILAYAH KASHMIR.....</b>	<b>16</b>
2.1 Pasang Surut Konflik Kashmir dan Kepentingan India.....	18
2.2 Peran SAARC.....	27

<b>BAB III ANALISIS KONFLIK SENGKETA KASHMIR MENGUNAKAN TEORI DIPLOMASI KOERSIF.....</b>	<b>31</b>
1.1     Aspek <i>Propostionality</i> .....	32
1.2     Aspek <i>Reciprocity</i> .....	41
1.3     Aspek <i>Coercive Credibility</i> .....	46
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
4.1     Kesimpulan .....	48
4.2     Rekomendasi .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR SINGKATAN



BJP	: Bharatiya Janata Party
CTBT	: Comprehensive Nuclear Tes-Ban Treaty
GDP	: Gross Domestic Product
HAL	: Hindustan Aeronautics Ltd
IAF	: Indian Air Force
ICBMs	: Interconetinal Ballistic Missiles
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LoC	: Line of Control
OKI	: Organisasi Kerja sama Islam
PDP	: Peoples Democratic Party
SAARC	: South Asia Association for Regional Cooperation
UN	: United Nations
UNCIP	: United Nations Commission for India and Pakistan
US	: United State
USD	: United State Dollar

## ABSTRAK

Sejak tahun 1947 bersamaan dengan kemerdekaan India dan Pakistan, Kashmir menjadi wilayah yang dipersengketakan kedua negara. Dinamika konflik yang berjalan secara fluktuatif bergantung pada kondisi hubungan kedua negara. Sehingga berbagai cara pernah diupayakan, baik secara *soft* dengan membentuk perjanjian kerja sama dan pemberian otonomi, atau secara *hard* dengan melakukan uji coba nuklir dan agresi militer. Oleh karena itu teori diplomasi koersif mampu digunakan untuk menganalisis konflik sengketa wilayah Kashmir. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti mengenai upaya India pada tahun 2012-2018 untuk mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya. Dengan diplomasi koersif yang dilakukan India terhadap Pakistan untuk mencapai kepentingannya atas Kashmir.

Kata Kunci : Konflik Kashmir, diplomasi koersif, status khusus,

## ABSTRACT

Since 1947 with the independence of India and Pakistan, Kashmir has become a disputed territory of the two countries. The dynamics of current conflict fluctuate depending on the conditions of relations between the two countries. Much effort has been made, either softly by forming cooperative agreements and granting special autonomy, or by nuclear testing and military aggression. Therefore coercive diplomacy theory is able to be used to analyze conflicts over the Kashmir region. This is interesting to study about India's efforts in 2012-2018 to maintain Kashmir as part of their territory. Coercive diplomacy carried out by India towards Pakistan to achieve its interests in Kashmir.

Keywords : Kashmir conflict, coercive diplomacy, special status.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik saudara yang terjadi di wilayah Kashmir melibatkan India dan Pakistan menjadi konflik yang berkepanjangan dan sudah menjadi isu internasional. Konflik terjadi sejak kolonial Inggris membagi wilayah menjadi kedua negara pada tahun 1947 sehingga menjadikan India dan Pakistan negara yang merdeka. Namun pembagian wilayah Kashmir yang secara teritorial masuk ke dalam wilayah India menjadi konflik yang terus berlanjut hingga saat ini. Sejak Inggris memisahkan kedua wilayah ini, benturan kepentingan atas penguasaan wilayah Kashmir ini menjelma menjadi sebuah konflik besar antar negara.

Kashmir dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, sekitar 85% dari delapan juta penduduknya muslim. Dengan wilayah seluas 222.236 km<sup>2</sup> tersebut terletak di wilayah jantung Asia, secara geografis yang terletak sangat strategis dengan berada di wilayah yang berbatasan dengan negara-negara besar lainnya. Wilayah Kashmir sebelah utara berbatasan langsung dengan Rusia dan China, sebelah timur berbatasan dengan China Sinkiang dan Tibet, sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, dan sebelah selatan berbatasan dengan India (Widyawati, 2010).

Konflik sengketa Kashmir ini tidak terjadi semata-mata karena perebutan kekuasaan atas suatu wilayah, namun terdapat beberapa kepentingan yang kompleks

menjadi latar belakang terjadinya konflik yang berkepanjangan ini. Dimulai dari faktor agama, mayoritas masyarakat Kashmir beragama Islam. Sehingga secara batin, akan merasa terikat dan Pakistan merasa lebih cenderung dekat atas dasar kesamaan ideologi. Namun penguasa di Kashmir didominasi oleh kaum Hindu dan Maharaja Singh yang menjadi penguasa Kashmir pada tahun 1947, sehingga lebih cenderung sependapat dengan pemerintah India. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Kashmir menjadi konflik yang susah untuk mencapai titik kesepakatan, karena internal Kashmir sendiri sering terjadi pemberontakan, terorisme, dan penyerangan bersenjata.

Secara militer, di wilayah Khasmir terdapat pangkalan militer India yang semakin berkembang. Dengan adanya militer yang semakin kuat, India mampu berkuasa dan mendominasi di atas wilayah Kashmir. Dapat dilihat melalui beberapa kali kasus peperangan yang terjadi sejak kedua negara tersebut merdeka, mulai dari tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999. Dari 4 kali terjadi eskalasi ketegangan militer tersebut, India berhasil memukul mundur pasukan militer Pakistan dengan diakhiri gencatan senjata dan diplomasi dengan menandatangani perjanjian yang telah disepakati.

Faktor kondisi alamiah wilayah Kashmir, sehingga menarik perhatian para pemegang kekuasaan. Kondisi alamiah Kashmir layaknya surga yang terletak di kaki Gunung Himalaya. Dengan tanah yang subur, pemandangan indah, dan mengalirnya sungai besar Indus, Jhelum, dan Chenab yang sangat menguntungkan sektor pertanian. Potensi besar untuk obyek wisata yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya dan juga merupakan pusat industri wol dan karpet. *A garden of eternal spring dan an iron for a palace of kings* menjadi julukan Kashmir atas sumber daya

alam yang dimilikinya. Dengan hasil bumi yang sangat menjanjikan bagi ekonomi di masa depan salah satunya industri tekstil (Rizky, 2016).

Beberapa alternatif telah diupayakan untuk menjadi solusi dari konflik sengketa Kasmir tersebut, mulai dari resolusi konflik UN pada tahun 1948, bantuan dari negara-negara *super power* seperti Amerika, Rusia, dan China juga turut menawarkan. Berbagai usaha telah ditempuh dan dicoba oleh kedua negara untuk membentuk perdamaian. India dan Pakistan menyetujui untuk gencatan senjata dan menyepakati pembagian wilayah di mana India berhak atas dua pertiga dan Pakistan berhak atas sepertiga wilayah Kasmir (Media Indonesia, 2015). Pada tahun 1965 konflik kembali memanas dan menunjukkan bahwa resolusi UN telah gagal. Sampai pada tahun 2008 kondisi hubungan kedua negara *chaos* dengan terjadinya penyerangan di Mumbai oleh kelompok radikal yang berbasis di Pakistan.

Sebagai bentuk upaya diplomasi koersif India, pada 19 April 2012 India berhasil meluncurkan uji coba rudal Agni V. Rudal jarak jauh ini memiliki kemampuan sejajar dengan rudal jarak jauh yang dimiliki Tiongkok, Rusia, Perancis, Amerika, dan Inggris. Dengan kemampuan membawa hulu ledak seberat 1,5 ton, tinggi 17,5 meter, memiliki tiga tingkat dan berat luncuran mencapai 50 ton dan total biaya pembuatan mencapai 480\$ US atau sekitar Rp 4,4 triliun. Konon jangkauan rudal jarak jauh Agni V bisa mencapai Jakarta, Beijing dan sejumlah wilayah selatan Eropa (BBC, 2012).

Sebagai respon dari uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan India, Pakistan melakukan uji coba rudal jarak menengah pada 25 April 2012. Konon kekuatan rudal



mampu menjangkau sejauh 2.500 hingga 3.000 kilometer, diperkirakan sampai ke Tiongkok dan India tentu masuk dalam jangkauan. Uji coba nuklir secara bergantian sebagai upaya saling menunjukkan power masing-masing negara sudah menjadi rutinitas yang dilakukan India dan Pakistan sejak 1998 (Detik News, 2012).

Pada 29 September 2013 ketegangan kedua negara meredam ditandai dengan Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Nawaz Sharif Perdana Menteri Pakistan bertemu di New York dalam acara *United Nations General Assembly*. Mereka bersepakat untuk menghentikan segala serangan yang terjadi dan menjaga kondisi perdamaian kedua negara dengan kerja sama dan penguatan batas *Line of Control*. Ketika kedua Perdana Menteri tersebut bertemu, Narendra Modi yang saat itu masih menjadi kandidat Perdana Menteri India selanjutnya memberikan dukungan penuh atas upaya diplomasi kedua pemimpin parlemen tersebut (Walsh, 2013).

Kerja sama pertandingan olahraga kriket yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, sebagai salah satu upaya untuk menjalin hubungan baik antara India dan Pakistan. Kedua negara tersebut selalu terlihat jelas bersaing dalam pertandingan, sehingga seolah terlihat seperti perang tanpa baku tembak. Banyak pihak yang mengharapkan dengan adanya kerja sama dari olahraga ini dapat membawa dampak positif untuk perdamaian kedua negara, sehingga kedua negara akan menaruh rasa saling percaya dan terjalin diplomasi serta kerja sama di berbagai bidang lainnya (Pasricha, 2012).

Pakistan berargumen bahwa India terus menolak menunaikan janjinya untuk memberikan kesempatan masyarakat Kashmir menentukan nasibnya sendiri.

Sedangkan India berargumen bahwa Pakistan adalah penjajah yang mendukung terhadap pemberontakan dan mengambil alih Kashmir dengan kekerasan (Hau, Ravichandran, & Guido, 2013). Sejak kedua negara berkonflik dari tahun 1947 hingga saat ini rasa saling curiga antar kedua negara masih tetap tinggi, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan perdamaian bersama. Beberapa upaya diplomasi telah dilakukan, mulai dari olahraga, pemberantasan terorisme, dan perdagangan. Oleh karena itu menarik untuk melihat upaya India dalam menangani konflik sengketa wilayah Kashmir yang hingga saat ini masih dalam pembahasan untuk mencari solusi.

Sejak 2012 masa kepemimpinan Perdana Menteri Manmohan Singh sampai pada periode Perdana Menteri Narendra Modi tahun 2018. Berbagai upaya banyak dilakukan pemerintah India namun, konflik belum sampai pada titik akhir perdamaian. Dari berbagai upaya dalam menghadapi dinamika konflik Kashmir selama ini, India menggunakan banyak cara baik secara militer (*hard power*) maupun diplomasi dan kerja sama (*soft power*).

Pada April 2012 kedua negara saling menunjukkan *hard power* dengan uji coba nuklir, upaya ini menjadi pemicu hubungan kedua negara kembali memanas. Namun dilanjutkan pada 29 September 2013 *soft power* terlihat dari Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Nawaz Sharif Perdana Menteri Pakistan yang bertemu di New York dalam acara *United Nations General Assembly*. Mereka bersepakat untuk menghentikan segala serangan yang terjadi dan menjaga kondisi perdamaian kedua negara dengan kerja sama dan penguatan batas *Line of Control* (York, 2013).

Berdasarkan data dan realitas tersebut, maka penulis ingin membahas lebih detail mengenai Upaya India dalam menghadapi konflik dengan Pakistan mengenai sengketa wilayah Kashmir khususnya sejak tahun 2012-2018. Adapun analisa penelitian ini penulis menggunakan teori diplomasi koersif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai sengketa wilayah Kashmir. Bagaimana upaya diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir tahun 2012 - 2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut yakni:

1. Menganalisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau
2. Menjelaskan upaya diplomasi koersif India dalam konflik sengketa wilayah Kashmir pada tahun 2012-2018, yang diupayakan untuk dapat menjaga hubungan diplomatik kedua negara.

## 1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat relevan dengan kajian studi penulis yaitu tentang sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan pada tahun 2012-2018.

Mengingat kasus ini menjadi salah satu konflik internasional yang fluktuatif dan berkepanjangan, serta upaya diplomasi koersif banyak dilakukan oleh India dalam menghadapi konflik sengketa wilayah Kashmir dengan Pakistan. Terlebih program studi Hubungan Internasional UII memiliki konsentrasi kajian pada *human security* dan sebagai universitas islam yang memiliki keunggulan dalam sisi religius. Sehingga konflik ini masih sangat relevan untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam.

### 1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2012-2018 untuk melihat proses atau pertimbangan pemilihan strategi India dalam menghadapi konflik dengan menggunakan analisis diplomasi koersif. Pada tahun 2012 India melakukan uji coba rudal jarak jauh Aghni V, hal tersebut menjadi titik awal hubungan India Pakistan kembali bersitegang dan akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam kawasan Asia Selatan, India dan Pakistan merupakan negara yang kuat dan sama-sama mengancam negara lainnya jika peperangan terulang kembali. India yang memiliki kekuatan lebih dari Pakistan, baik dari militer, nuklir, maupun otoritas politiknya, sehingga sulit bagi Pakistan untuk dapat menguasai wilayah Kashmir.

Dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk perdamaian India dan Pakistan sejak kedua negara tersebut merdeka. Mengingat pada rentang tahun penelitian tersebut terjadi perubahan jabatan Perdana Menteri di India, sehingga ada perubahan dalam kebijakan luar negerinya dan upaya diplomasi koersif banyak dilakukan India dalam menghadapi Pakistan. Upaya diplomasi koersif yang dilakukan India dari berbagai aspek seperti nuklir, militer, dan politiknya banyak dilakukan India. Oleh

karena itu, penelitian ini membahas tentang upaya diplomasi koersif India dalam menghadapi konflik Kashmir. Ruang lingkup berfokus pada kebijakan India untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi sengketa wilayah Kashmir. Dengan ini penulis dapat melihat upaya yang dilakukan India untuk mempertahankan wilayah Kashmir menggunakan diplomasi koersif.

Konflik perselisihan politik antara India dan Pakistan pasca kemerdekaan yang memperebutkan wilayah Kashmir memang sudah sering dikaji oleh para peneliti sejarah maupun ilmu politik. Upaya diplomasi koersif melalui *hard power* terlihat sejak pasca kemerdekaan sampai pada peperangan yang ke 4 pada tahun 1999. Sejak memasuki tahun 2000'an upaya *soft power* banyak dilakukan oleh India, namun belum mencapai titik terang perdamaian yang disepakati kedua negara. Analisa lebih lanjut tentang pertentangan antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir dari aspek diplomatik kedua negara dirasa penting untuk lebih diperdalam lagi. Dengan demikian tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu analisa yang memperkuat analisa-analisa sebelumnya tentang konflik wilayah Kashmir, terutama dari sudut pandang diplomasi koersif yang dilakukan India.

#### 1.6 Tinjauan Pustaka

Hubungan India dan Pakistan selalu fluktuatif dari sejak kedua negara tersebut merdeka. Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menempuh perdamaian diantara kedua negara, namun belum terlihat hasil yang sesuai dengan harapan atas penyelesaian konflik Kashmir. Maka dari itu dalam tinjauan pustaka ini, penulis mencoba memaparkan beberapa data pendukung yang bersumber dari karya tulis

ilmiah. Hal ini dapat memberikan kontribusi dan menggambarkan upaya diplomasi koersif India dalam konflik sengketa wilayah Kashmir.

Dalam buku yang berjudul "*Kashmir: Derita yang Tak Kunjung Usai*" yang ditulis oleh Dhurorudin Mashad dan di terbitkan oleh Khalifa di Jakarta pada tahun 2004, menjelaskan tentang penderitaan rakyat Kashmir akibat dari eskalasi konflik antara India dan Pakistan. Buku ini sangat membantu penulis dalam memberikan gambaran tentang kajian konflik Kashmir secara mendetail dengan penelitian yang terjun langsung ke lapangan dan memberikan kumpulan informasi yang tersistemisasikan. Sehingga dapat terlihat dinamika konflik yang fluktuatif dan upaya penyelesaiannya baik secara militer maupun kerja sama bilateral. Buku ini menjadi panduan penulis dalam meneliti konflik sengketa wilayah Kashmir mulai dari sejarah, penyebab, dan upaya India dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah Kashmir. Oleh karenanya penulis akan melanjutkan analisis konflik Kashmir yang masih berjalan dengan menggunakan konsep diplomasi koersif dari tahun 2012-2018 dan belum menghasilkan titik temu yang dapat disepakati semua pihak.

Penulis juga menelaah jurnal yang berjudul "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India – Pakistan Periode 2011 – 2013 yang dianalisis menggunakan teori realisme. Dalam jurnal tersebut ada argumen yang menarik yaitu "*Civis Pasum Para Bellum*" (*if you want to make peace them, be prepared for war*) yang artinya Jika anda ingin membuat perdamaian mereka, bersiaplah untuk perang. Penulis jurnal tersebut memiliki argumen bahwa *the best way conflict resolution between India and Pakistan is a war* (Rizky, 2016).

Jurnal tersebut menganalisis bahwa UN tidak memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian konflik sengketa wilayah Kashmir. Terlihat dalam upaya UN mengeluarkan resolusi tahun 1949 ketika perang pertama antara India – Pakistan, namun tidak pernah dipatuhi dan terlaksana. Upaya terakhir resolusi konflik UN yang menghasilkan Perjanjian Simla, tetapi tidak lagi efektif karena Pakistan kalah pada perang tahun 1999. Salah satu isi dari Perjanjian Simla adalah India dan Pakistan akan menyelesaikan konflik Kashmir secara bilateral. Berbeda dengan penulis jurnal tersebut, dalam tulisan ini penulis menganalisis upaya penyelesaian konflik dengan teori diplomasi koersif yang mana mampu menjelaskan konflik yang fluktuatif. Jadi keterkaitannya jurnal tersebut dengan penelitian ini ada memiliki topik bahasan yang sama tentang konflik sengketa wilayah Kashmir. Namun perbedaannya pada tahun penelitian dan konsep yang digunakan untuk menganalisis studi kasus.

Dalam jurnal yang berjudul “*Solutions to the Conflict in Kashmir*” yang ditulis pada tahun 2015 oleh Nikolis Kurr dari Bowling Green State University. Menjelaskan beberapa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah Kashmir yang masih menjadi konflik berkepanjangan. Solusi pertama yang ditawarkan adalah *political independence for Kashmir*. Yang mana Kashmir diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan keinginan masyarakat Kashmir. Solusi kedua adalah *formal partition in Kashmir*. Dengan menyepakati *Line of Control* (LOC) atau disesuaikan dengan perundingan garis batas masing-masing wilayah dan diharapkan bisa menjadi *soft borders and demilitarization*. Solusi ketiga adalah *autonomy for the region of Kashmir*. Hampir sama dengan solusi pertama, akan tetapi solusi ketiga ini bisa menjadi *the golden*

*solution* yang paling memungkinkan untuk diwujudkan. Karena setiap daerah akan diberikan otonomi sesuai dengan daerah masing-masing baik secara terpisah atau tunggal, sesuai dengan *article 370 of the Indian Constitution that specifically grants autonomy to Kashmir* (Kurr, 2015).

Solusi yang dibahas dalam jurnal tersebut dapat digunakan sebagai pembandingan atas upaya diplomasi koersif India dalam konflik sengketa wilayah Kashmir. Namun pada realitanya solusi yang ditawarkan tersebut hanya dianggap sebagai formalitas oleh pemerintah India dan dapat disimpulkan gagal, karena kondisi hubungan kedua negara yang fluktuatif sehingga situasi dan kondisi konflik mengikuti bagaimana kedua hubungan negara berjalan.

Termasuk juga sebuah jurnal yang berjudul "*Pakistan – India Conflict with Special Reference to Kashmir*" yang dituliskan oleh Musarat Javed Cheema dari *University of The Punjab* pada tahun 2015. Jurnal tersebut menggaris bawahi *point of view* dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan atas Kashmir. Dalam pembahasan ini terdapat 3 aktor dengan kepentingan yang berbeda yaitu India, Pakistan, dan Kashmir. Geopolitik ketiga aktor tersebut membawa kondisi dan status Kashmir tidak memiliki kejelasan. India ingkar janji untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Kashmir untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan UN yang telah disepakati. Pakistan tidak mampu menolong rakyat Kashmir, UN belum memberikan solusi yang mampu mengakhiri konflik serta OKI pun tidak memiliki posisi yang signifikan dalam konflik tersebut.

Dinamika konflik dan kepentingan dari berbagai aktor sehingga menimbulkan eskalasi pasang surut antara India dan Pakistan yang dijelaskan dalam jurnal ini



memiliki relevansi dengan pembahasan penulis. Namun terikat dengan rentang tahun dan konsep analisis yang berbeda, sehingga penulis akan memiliki analisis sudut pandang dan pembahasan yang bisa digunakan sebagai rujukan terbaru untuk penelitian selanjutnya.

Sebuah laporan penelitian yang berjudul "*Military Budgets in India and Pakistan: Trajectories, Priorities, and Risks*" diterbitkan oleh Stimson Center. Penelitian tentang perkembangan anggaran militer India dan Pakistan yang dilakukan hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa selalu ada peningkatan. Baik India maupun Pakistan, pertahanan negara selalu ditingkatkan khususnya militer dan nuklir. Namun terjadi ketimpangan diantara dua negara dengan perbandingan tujuh banding satu, India mengalahkan rasio pertahanan Pakistan. Sehingga dalam tulisan tersebut mengatakan bahwa sekeras apapun usaha Pakistan untuk menandingi India, hal tersebut akan sangat sulit terwujudkan.

### 1.7 Landasan Konseptual

Rumusan masalah tersebut akan di analisis menggunakan teori diplomasi koersif dengan berfokus pada upaya diplomasi India terhadap Pakistan dalam menghadapi konflik sengketa wilayah Kashmir. Teori ini dapat digunakan untuk melihat kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah India dalam menghadapi konflik sengketa Kashmir dari tahun 2012-2018. Ada beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam menghadapi konflik sengketa wilayah Kashmir diantaranya adalah uji coba nuklir, kunjungan kerja kepala

negara, memperkuat militernya, serta membuat kebijakan untuk mewujudkan kepentingan nasional dari menjaga *power* dalam struktur internasional.

Dalam konflik ini sangat terlihat bahwa segala upaya kerja sama bilateral India dan Pakistan tidak ada yang mampu bertahan dalam kedamaian untuk jangka panjang. Begitu pula dengan kerja sama pihak ketiga seperti SAARC, UN dan beberapa negara *super power* pernah diupayakan. Pemikiran siapa yang paling diuntungkan dan rasa saling curiga satu sama lain menjadi salah satu faktor mustahilnya konflik berakhir.

Bruce Jentleson mendefinisikan diplomasi koersif bahwa diplomasi dengan tingkat paksaan yang terbatas. Kekuatan militer selalu menjadi pilihan utama yang digunakan untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan pihak penekan. “*This is a diplomatic strategy with a degree of limited coercion*” (Jentleson, 2006).

Diplomasi koersif memiliki pengertian dan bentuk upaya yang berbeda dengan diplomasi klasik pada umumnya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menghindari perang. Upaya tersebut berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa dengan upaya *soft power* berupa kerja sama kedua negara atau *hard power* baik dengan uji coba nuklir maupun kekuatan militer yang mengancam. Jadi diplomasi ini digunakan hanya untuk mengintimidasi suatu negara agar patuh.

Menurut Bruce Jentleson ada 2 faktor yang menjadi penentu keberhasilan diplomasi koersif yaitu strategi *coercer* (pihak penekan) dan *counter-strategy* (pihak target). Namun dalam tulis ini penulis akan berfokus pada strategi *coercer* yang mana

India sebagai pihak penekan terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir. Karena India merupakan negara yang lebih kuat daripada Pakistan baik secara regional maupun internasional dan Kashmir bagian India yang selalu menjadi perdebatan & pemicu dalam konflik kedua negara tersebut.

Ada 3 aspek yang menjadi atribut untuk pembahasan dalam konsep strategi *coercer* sebagai pihak penekan, diantaranya:

1. Aspek *proportionality*

*Coercer state* harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin besar kebutuhan negara penekan terhadap negara target maka pihak penekan akan dituntut untuk menggunakan strategi yang dapat meningkatkan kerugian negara target bila ia memilih sikap tidak patuh dan keuntungan negara target bila memilih sikap patuh (Jentleson, 2006)

2. Aspek *reciprocity*

*Coercer state* mampu membuat kedua belah pihak yakin bahwa setelah tuntutan dipenuhi oleh negara target maka akan diberikan imbalan atau setelah imbalan diberikan *coercer state* maka tuntutan akan dipenuhi. Pada intinya hubungan kedua belah pihak harus saling menguntungkan “*something for something*” (Jentleson, 2006).

3. Aspek *coercive credibility*

Dalam melakukan kerja sama harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, akan ada konsekuensi apabila mengalami penolakan.

Sehingga *coercer state* melakukan intimidasi untuk tepat mendapatkan kepentingannya (Jentleson, 2006).

## 1.8 Metode penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan jenis penelitian metode kualitatif untuk melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif, dengan tinjauan sumber penelitian akan menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan sumber data sekunder, penelitian ini merujuk pada pembahasan upaya diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir.

### 1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis akan menggunakan data sekunder. Di mana melakukan analisis pada sumber-sumber seperti dokumen-dokumen, website resmi buku, jurnal, serta berita online yang akan dijadikan tinjauan dengan metode kualitatif yang telah dipaparkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk mengetahui sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana upaya diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir pada tahun 2012-2018.

### 1.8.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah India, sehingga penulis akan menganalisis upaya diplomasi koersif India terhadap Pakistan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir pada tahun 2012-2018 dengan menggunakan teori diplomasi koersif.

## BAB II

### DINAMIKA KONFLIK SENGKETA WILAYAH KASHMIR

Konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi isu bilateral, regional, dan internasional yang fluktuatif. Sejak kedua negara merdeka di tahun 1947, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Karena konflik bagaikan bom waktu yang sering terjadi sewaktu – waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Secara regional terdapat organisasi *South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC), yang selalu melakukan pembahasan upaya penyelesaian konflik pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk perdamaian kawasan. Terlebih India dan Pakistan merupakan 2 negara *powerful* di kawasan Asia Selatan, lengkap dengan militer dan nuklir yang menjadi alternatif utama ketika konflik memuncak. Secara internasional *United Nations* (UN) telah mengeluarkan kebijakan untuk resolusi sebagai upaya penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian dunia. Kondisi konflik sengketa wilayah yang sangat kompleks ini akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

Sejak India dan Pakistan merdeka, beberapa kali peperangan terjadi. Tahun 1947-1948 kedua negara tersebut perang memperebutkan wilayah yang dibagi secara sepihak oleh kolonial Inggris, hal tersebut menjadi titik awal konflik sengketa wilayah dimulai dan diakhiri dengan gencatan senjata. Tahun 1965 perang yang

kedua kalinya terjadi dan diakhiri pada “Perjanjian Simla” tahun 1972. Tahun 1999 perang yang ketiga disebut sebagai “Perang Kargil”, terjadi saat musim panas di wilayah Kargil dengan melanggar batas wilayah kedua negara atau *Line of Control* (LoC).



Sumber: (United Nations, 2011)

Kashmir menjadi wilayah yang tidak bertuan ketika Inggris membagi kedua negara menjadi Pakistan dan India karena berdasarkan dari sudut pandang agama yang dianut mayoritas, sehingga mereka memperebutkan Kashmir. India mengendalikan 45% dari bagian tenggara dan timur yaitu Jammu dan Kashmir. Pakistan mengendalikan 35% dari bagian utara dan barat yaitu Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan. China mengendalikan 20% dari wilayah timur laut yaitu Aksai Chin. Seperti dalam peta berikut ini dan tertulis juga pembagian *Line of Control* yang disepakati dalam Perjanjian Simla.

## **2.1. PASANG SURUT KONFLIK KASHMIR DAN KEPENTINGAN INDIA**

Salah seorang mantan pejabat departemen luar negeri US, Josef Korbel dalam karyanya yang berjudul *Danger in Kashmir* menyebutkan bahwa sejarah Kashmir tak lebih sebagai sebuah cerita tentang kesedihan (*the history of sadness*). Sejarah mencatat bahwa sejak Kashmir dijual oleh kolonial Inggris kepada Raja Gulab Singh, seorang tuan tanah dari keluarga Dogra di Jammu seharga 750.000 *pounds* atau sekitar 7,5 juta *rupee*. Melalui *Treaty of Amritsar* yang ditandatangani pada tahun 1846 dan sejak saat itu Kashmir beserta Jammu berada di bawah kekuasaan Raja Hindu yang menjadi awal penderitaan umat Muslim Kashmir (Mashad, 2004).

Dibawah pemerintahan keluarga Dogra ini, kaum muslim Kashmir India merasa tertindas dan tertekan hidupnya. Mulai dari pendapatan perkapita yang sangat rendah hanya sekitar 11 *rupee* India atau 3 USD, dan penetapan pajak yang tinggi sekitar 21% dari pendapatan perkapita. Serta dalam aspek sosial budaya dikenai

hukuman 10 tahun penjara bagi umat Islam yang menyembelih sapi karena merupakan binatang suci bagi umat Hindu. Dengan berbagai tekanan yang dirasakan umat Muslim Kashmir, akhirnya mereka membentuk kelompok revolusioner untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara adil bagi masyarakat Kashmir tanpa memandang ideologi. Hal ini menjadikan kondisi Kashmir menjadi tidak stabil, dengan semangat jihad yang digunakan kaum muslim untuk melawan pemerintah Kashmir. Maka ketika itu penguasa Kashmir Maharaja Harry Singh meminta bantuan India yang akhirnya menjadi penetapan Kashmir secara resmi terbagi menjadi 2 wilayah pada 27 Oktober 1947, Kashmir India dan Kashmir Pakistan. Penetapan ini bukan menjadi solusi akhir dari konflik di Kashmir, justru menjadi pemantik konflik antara India dan Pakistan yang tidak ada ujungnya. Kondisi kedua negara yang fluktuatif menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki posisi hubungan yang labil.

Konflik sengketa wilayah Kashmir ini bukan hanya semata karena kepentingan politik, namun juga terselip konflik agama, ras dan suku. Dari berbagai kepentingan India, menjadikan wilayah Kashmir semakin kompleks dengan berbagai faktor yang melatar belakangi dan diperebutkan oleh dua negara. Konflik Kashmir menjadi perebutan wilayah oleh kedua negara, dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Namun mereka saling berjuang untuk menguasai Kashmir. Beberapa hal yang menjadi latar belakang kepentingan India untuk dapat menguasai Kashmir adalah;

1. Secara sejarah, Kashmir merupakan bagian dari tanah leluhur Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri pertama dan salah satu pendiri India). Maharaja Hary Singh



dan Jawaharlal Nehru bekerja sama agar Kashmir masuk ke wilayah India (Cheema, 2015). Jawaharlal Nehru merupakan tokoh yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat India, sehingga masyarakat India berjuang untuk mempertahankan wilayah Kashmir.

2. Secara geografis, sesuai dengan julukan Kashmir yaitu “tanah surga”. Kashmir memiliki wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya, dengan mengalirnya sungai-sungai besar Indus, Jhelum, dan Chenab yang mendukung bagi sektor pertanian. Selain itu Kashmir berbatasan dengan China, Afghanistan, dan Pakistan yang memiliki prospektif dalam berbagai bidang (Sitepu, 2017).

3. Secara ekonomi, keindahan wilayah Kashmir menarik banyak wisatawan pecinta alam untuk berkunjung. Ditambah dengan hasil bumi seperti padi dan sayur, serta peternakan seperti kuda, sapi, lembu, domba, dll. Kesuburan wilayah Kashmir ini tentu dapat meningkatkan devisa yang sangat besar bagi negara dan dapat digunakan untuk konsumsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kashmir (Sitepu, 2017).

Konflik sengketa wilayah Kashmir ini menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk juga *United Nations* (UN). Isu Kashmir masuk dalam agenda pembahasan UN yang hasilnya membentuk sebuah komisi dengan nama *the United Nations Commission for India and Pakistan* (UNCIP). Dalam agenda pembahasan tersebut menghasilkan resolusi yang fundamental tentang Kashmir pada tanggal 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949. Isi dari resolusi tersebut memberikan penawaran solusi bahwa “Masyarakat Jammu dan Kashmir akan memutuskan sendiri mengenai

statusnya untuk bergabung kepada India atau Pakistan dengan metode demokratis plebisit yang bebas dan menyeluruh di bawah pengawasan UN” (Mashad, 2004).

Ada beberapa hal yang menjadikan UN gagal memaksa India untuk dapat mengimplementasikan resolusi yang telah dijanjikan pasca kedua negara tersebut merdeka. *Pertama*, terdapat kepentingan nasional dari berbagai kekuatan besar dari anggota tetap Dewan Keamanan UN. India dan Rusia merupakan sekutu dalam geopolitiknya. Pakistan bersekutu dengan Amerika Serikat dan banyak kerja sama dengan Tiongkok dalam geopolitik kawasan Asia Selatan. Hal ini menjadi dilema bagi UN untuk mendesak India agar merealisasikan janji damai atas konflik Kashmir. *Kedua*, Inggris harusnya lebih tegas menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembagian wilayah Kashmir, namun justru Inggris lebih cenderung untuk menjalin kerja sama dengan India karena secara ekonomi lebih prospektif dimasa depan dan antipati terhadap pemerintahan konservatif Pakistan. *Ketiga*, negara-negara di dunia tampaknya lebih cenderung bekerja sama dengan India karena lebih menjanjikan dibandingkan Pakistan. Atas dasar pertimbangan ekonomi tersebut, *the Big Five* (Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Perancis) dalam UN dan beberapa negara Muslim anggota OKI lainnya kurang mampu untuk mendesak agar konflik sengketa wilayah Kashmir dapat berakhir sesuai dengan resolusi UN tahun 1949.

India turut andil dalam konflik pembebasan Bangladesh melawan Pakistan dan bersamaan dengan kemerdekaan Bangladesh sehingga disebut juga sebagai perang India – Pakistan 1971. Setelah berakhirnya konflik tersebut, India dan Pakistan membuat perjanjian damai yang disebut “*Simla Agreement*” dan

ditandatangani pada 2 Juli 1972. Salah satu isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah *Line of Control* (LoC) yang menjadi batas untuk kedua negara dalam menguasai wilayah Kashmir. Saat itu kedua negara yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dan Presiden Zulfikar Ali Bhutto, saling sepakat untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian untuk kedua negara sesuai dengan perjanjian (Ministry of External Affairs Government of India, 1972).

Perjanjian Simla tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan awal. Masyarakat Kashmir tidak merasa hidup sebagai bagian dari wilayah India, mereka hanya menuntut haknya kepada apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Namun pemerintah India berhasil memanipulasi media massa dengan membalikkan opini publik bahwa Kashmir yang berjuang menuntut haknya disebut sebagi gerakan separatis. Kashmir yang membela diri dan melakukan perlawanan atas penindasan dan kesewenang-wenangan oleh rezim India disebut sebagai teroris. Sebagian rakyat sipil Kashmir yang menjadi korban birokrasi intelijen New Delhi justru diputarbalikkan sebagai korban kaum militan Kashmir. Dan penyanderaan para wisatawan asing yang hakekatnya dilakukan oleh rekayasa pemerintahan New Delhi, dosa-dosanya ditimpakan kepada pejuang Kashmir (Mashad, 2004).

Beberapa tahun berlalu setelah berakhirnya Perang Kargil tahun 1999, hubungan India dan Pakistan membawa kabar baik dengan menandatangani kesepakatan untuk gencatan senjata pada tahun 2003. Hubungan India dan Pakistan terjaga dengan baik melalui kerja sama yang berlanjut ketika dibawah pemerintahan Mamohan Singh, pada 21 Oktober 2008 kedua negara mulai membuka jalur perdagangan seperti pakaian, rempah, buah, dan lain sebagainya yang melewati

wilayah Kashmir. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada 19 April 2012, India melakukan uji coba rudal Agni V yang jangkauannya bisa mencapai Jakarta, Beijing dan beberapa wilayah Eropa bagian selatan. Perdana Menteri Manmohan Singh hanya mengatakan bahwa uji nuklir jarak jauh tersebut hanya sebagai upaya mencari keamanan, kesiapan, dan keberhasilan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan (BBC Indonesia, 2012).

Rusia merupakan sekutu lama India yang memiliki perjanjian kerja sama militer dan transformasi teknologi nuklir sejak masih Uni Soviet. 24 Desember 2012 Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan kerja ke New Delhi sekaligus membahas peningkatan kerja sama militer dan perdagangan. Perdagangan India dan Rusia mencapai lebih dari USD 10 miliar per tahun, India juga tercatat sebagai importir terbesar di dunia dan Rusia memasok 70% dari keperluan senjata India dengan subsidi harga (BBC News, 2012).

Pada 9 Februari 2013, eksekusi hukuman mati kepada Mohammad Afzal Guru yang merupakan salah satu anggota kelompok teroris Jaish-e-Mohammed. Hukuman ini dijatuhkan karena mereka melakukan serangan teror di kantor parlemen India pada tahun 2001 dan Presiden Pranab Mukherjee menolak untuk memberikan remisi hukuman. Berlanjut pada 26 September 2013 Perdana Menteri India Manmohan Singh memperbaiki hubungan dengan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di New York, untuk sepakat mengurangi intensitas eskalasi militer di Kashmir (Priyamvatha, 2013).

Narendra Modi datang dari Gujarat dengan prestasinya yang sukses diakui masyarakat India, lalu terlepas dari masa lalunya yang diduga terlibat dalam kerusuhan anti muslim tahun 2002 dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Ketika Narendra Modi menggantikan jabatan Perdana Menteri yang dilantik pada 26 Mei 2014, mungkin bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat India. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif hadir memberikan penghormatan di hari pelantikan Perdana Menteri Narendra Modi dan memiliki harapan atas kesempatan yang baik untuk hubungan kedua negara di masa mendatang (BBC Indonesia, 2014).

Baku tembak kembali terjadi di wilayah Kashmir, sehingga India memberikan peringatan untuk gencatan senjata dan hubungan kedua negara kembali berseteru. Pakistan mengklaim, India mulai melanggar gencatan senjata dengan memperkuat militernya di wilayah Kashmir. Sedangkan India berargumen, bom gerilyawan yang didukung tentara Pakistan menewaskan seorang tentara India. Pada bulan Agustus 2014 situasi kedua negara berubah dengan sekejap dan akan terus berkembang secara fluktuatif. Perdana Menteri Manmohan Singh berjanji untuk menyelesaikan konflik wilayah perbatasan di Kashmir, namun lebih cenderung menggunakan militer dan hingga akhir 2014 India dan Pakistan saling berbalas kata-kata (CNN Indonesia, 2014).

Tepat pada 1 Maret 2015, *Chief Minister of Jammu and Kashmir* Mufti Mohammad Sayyed dari *Peoples Democratic Party* (PDP) baru saja dilantik oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang berasal dari *Bharatiya Janata Party* (BJP). Tepat pada saat itu partai BJP yang paling berkuasa di India mendeklarasikan untuk bekerja sama dan melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan partai PDP.

Secara garis besar hasil pertemuan dari Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Utama Mufti Sayyed adalah adanya kesepakatan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Kashmir bagian India baik secara perdamaian, ekonomi, legalitas hukum, maupun eksistensi militer (India Today, 2015). Nirmal Singh dari partai BJP terpilih sebagai Wakil Menteri Utama merupakan bagian hasil dari koalisi PDP dan BJP, yang sebelumnya selalu bertolak belakang kepentingan masyarakat India bagian Utara dan Selatan.

Hampir satu tahun menduduki jabatan sebagai *Chief Minister of Jammu and Kashmir*, Mufti Mohammad Sayeed meninggal pada 7 Januari 2016 dan digantikan oleh putrinya yaitu Mehbooba Mufti. Mewarisi tanggung jawab sebagai pemimpin PDP serta Menteri Utama Kashmir perempuan yang pertama dan terakhir. Kondisi kembali memuncak ketika terjadinya baku tembak di garis *Line of Control* (LoC) pada 13 November 2016. Hubungan keduanya berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, keduanya saling usir diplomat, saling melarang pemutaran film, serta banyak korban meninggal dan ribuan yang dievakuasi (Sari, 2016). India membawa kasus ini ke sidang umum UN dengan tujuan untuk mengucilkan Pakistan dan *Human Rights Watch* menyerukan untuk mengakhiri tindakan brutal yang melanggar kemanusiaan.

Bertepatan dengan peringatan 1 tahun meninggalnya Burhan Wani seorang militan anti pemerintah India, 7 peziarah Hindu meninggal selama melakukan prosesi keagamaan di distrik selatan Anantnag. Pemerintah India menyudutkan kelompok militan yang berbasis di Pakistan Lashkar-e-Taiba merupakan dalang dibalik serangan yang mengancam 115.000 peziarah Hindu pada 10 Juli 2017. Perdana

Menteri Narendra Modi mengatakan “India tidak akan pernah terjebak oleh serangan dari para pengecut dan mengutuk atas rasa sakit yang kami rasakan”. Kegiatan Amarnath Yatra merupakan rutinitas tahunan umat Hindu di kuil gua bukit Pahalgam, setiap tahunnya selalu terjadi baku tembak antara tentara India dan kelompok militan (Safi, 2017).

Hubungan PDP dan BJP mulai terjadi keretakan sejak awal tahun 2018, adanya perselisihan dan menyebabkan runtuhnya aliansi kedua partai tersebut. 19 Juni 2018 disampaikan secara resmi melalui sekretaris jendral nasional *Bharatiya Janata Party* (BJP) Ram Madhav bahwa “Ketua Menteri Mehbooba Mufti gagal memperbaiki situasi keamanan di wilayah Kashmir, sehingga tidak mungkin bagi BJP untuk melanjutkan aliansi dengan PDP dan pemerintah Kashmir. Kami memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan atas Kashmir kepada Presiden.” (Uniyal, 2018). Selain alasan klasik tersebut, perubahan geopolitik di India tentu menjadi alasan yang sangat kuat dalam mendorong PDP dan BJP untuk meruntuhkan aliansinya.

Setelah BJP menarik diri dari aliansi dan mendesak pemerintah Kashmir untuk mengembalikan kuasa Kashmir kepada negara yang mana Presiden dan Perdana Menteri berasal dari BJP. *Chief Minister of Jammu and Kashmir* Mehbooba Mufti mengundurkan diri dan pemerintah India mengambil alih. Sejak 2016 kedua partai mendeklarasikan untuk membentuk aliansi, tentu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat kedua partai sejak awal memiliki kepentingan yang bertolak belakang dan hanya menunggu waktu untuk kembali berkonflik. Ketika menyampaikan pengunduran dirinya di depan *pers*, Mufti mengatakan bahwa “Jammu dan Kashmir bukan wilayah musuh, mereka merupakan bagian dari India

yang harus diperhatikan. Kebijakan yang keras tidak akan berhasil di Kashmir.” Hal ini merujuk pada kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi yang cenderung lebih keras dan selalu menggunakan militer dalam menyelesaikan masalah Kashmir (Fareed, 2018). Sejak 20 Juni 2018 secara resmi pemerintah India mengambil alih kuasa atas Kashmir, dan banyak diprediksi akan semakin sulit untuk hidup dengan damai bagi masyarakat Kashmir.

Dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang fluktuatif sangat tepat untuk dianalisis menggunakan teori diplomasi koersif. Pembahasan tersebut akan dilanjutkan pada bab selanjutnya, disertai data-data untuk memperjelas mengenai analisis teori diplomasi koersif dengan studi kasus konflik sengketa wilayah Kashmir.

## **2.2. PERAN SAARC**

*South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC) merupakan organisasi regional Asia Selatan digagas pada 8 Desember 1985 yang terdiri dari Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Sesuai dengan piagam SAARC, organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk :

*“To promote the welfare of the peoples of South Asia and to improve their quality of life; to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials; to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia; to contribute to mutual trust,*



*understanding and appreciation of one another's problems; to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields; to strengthen cooperation with other developing countries; to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interests; and to cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes” (SAARC, 1985)*

Dengan piagam SAARC yang sama-sama telah disepakati seluruh anggota negara kawasan Asia Selatan, masih menyisakan konflik sengketa wilayah Kashmir yang fluktuatif. Tentunya SAARC sebagai pihak ketiga dan atau mediator memiliki kewajiban untuk andil dalam penyelesaian konflik sengketa tersebut. KTT SAARC selalu membahas konflik sengketa wilayah Kashmir, mengingat India dan Pakistan merupakan negara yang kuat dalam kawasan Asia Selatan. Internasionalisasi isu selalu dilakukan oleh Pakistan, dengan tujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat internasional dan mampu mendesak India agar konflik bisa berakhir. Pada setiap agenda internasional dalam UN maupun secara regional dalam SAARC, Pakistan selalu berusaha untuk mengangkat isu sengketa wilayah Kashmir.

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2018 SAARC mempertemukan India dan Pakistan meskipun belum sampai pada titik akhir konflik, namun mediasi dilakukan sebagai upaya mengatasi konflik tersebut. Keterlibatan SAARC bukan hanya menunaikan kewajibannya sebagai organisasi yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan kestabilan kawasan, namun terdapat kepentingan lain yang

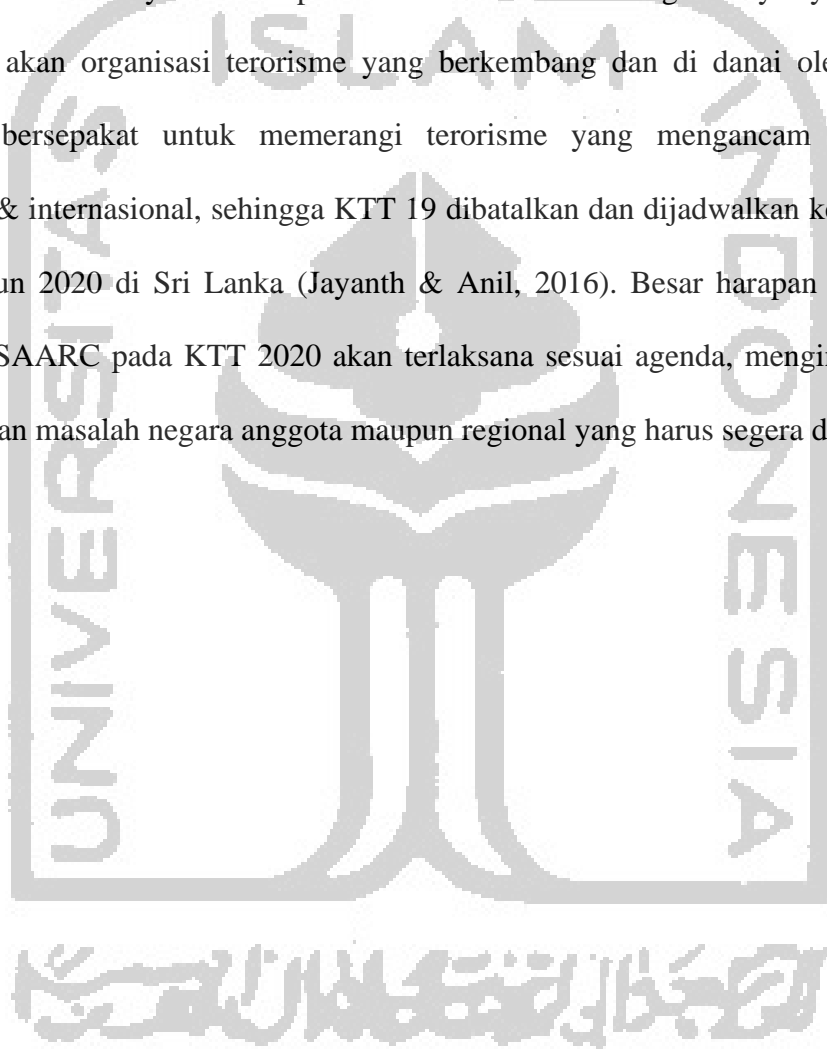
mendorongnya untuk selalu menjadikan Kashmir sebagai salah satu topik bahasan yang tidak berujung.

Pada tahun 1999 terjadi perang Kargil di perbatasan wilayah India dan Pakistan yang diakhiri dengan India berhasil merebut kembali wilayah Kargil dan membekukan hubungan diplomatik dengan Pakistan. Hubungan diplomatik kedua negara kembali terjalin pada KTT ke 11 tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2008 banyak terjadi dialog perdamaian antar kedua negara meski tidak memiliki harapan perdamaian yang tinggi. Akhir 2008 hubungan India Pakistan kembali memuncak dimulai dengan serangan teroris di Mumbai.

KTT ke 18 pada 26 November 2014 di Nepal, hasil sangat jauh dari harapan. Pada KTT ini hanya memiliki 3 perjanjian yang menjadi agenda pembahasan SAARC bersama, namun hanya satu yang disepakati yaitu *connectivity agreements on road*. Untuk pembahasan mengenai kereta api & energi, dan investasi yang didukung oleh 8 negara anggota SAARC untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan masih belum bisa disepakati bersama karena Pakistan masih memiliki kendala konflik internal (Muni, 2014). Setidaknya dengan terjalinnya kerja sama India dan Pakistan, konflik mampu diredam untuk sementara waktu.

Pada KTT SAARC ke 19 yang direncanakan akan digelar pada 9-10 November 2016 di Islamabad dibatalkan. Berawal dari India yang tidak berkenan menghadiri agenda tersebut, lalu disusul dengan Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka, dan Maldives ikut memboikot Pakistan. India bersitegang dengan Pakistan karena terjadi serangan oleh kelompok teroris dari Pakistan Jaish-e-Mohammed di

kamp militer Uri daerah Kashmir dan 18 tentara India terbunuh. Bangladesh selama beberapa bulan terakhir menjelang KTT ke 19 terlibat perang kata-kata, yang mana Pakistan menuduh Bangladesh banyak mengeksekusi elite politik Pakistan pada perang tahun 1971 untuk kemerdekaan Bangladesh. Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives menyatakan keprihatinan atas kondisi regionalnya yang sedang waspada akan organisasi terorisme yang berkembang dan di danai oleh Pakistan. Mereka bersepakat untuk memerangi terorisme yang mengancam perdamaian regional & internasional, sehingga KTT 19 dibatalkan dan dijadwalkan kembali KTT pada tahun 2020 di Sri Lanka (Jayanth & Anil, 2016). Besar harapan bagi negara anggota SAARC pada KTT 2020 akan terlaksana sesuai agenda, mengingat banyak konflik dan masalah negara anggota maupun regional yang harus segera dibahas.



### BAB III

## ANALISIS KONFLIK SENGKETA KASHMIR MENGGUNAKAN TEORI

### DIPLOMASI KOERSIF

Diplomasi merupakan sebuah upaya yang dianggap memiliki efektivitas dan efisiensi dibandingkan dengan perang untuk menjaga kestabilan dan perdamaian dunia. Tujuan dari upaya diplomasi adalah untuk mencari jalan keluar dari sebuah konflik antara dua negara, yang mana solusi yang dicapai selama proses diplomasi mengandung kepentingan dari masing-masing negara yang berkonflik.

Diplomasi koersif digunakan dengan tujuan untuk mengubah sikap atau keputusan suatu negara melalui pemberian ancaman, sanksi, pemutusan atau pembatalan kerja sama. Dalam diplomasi koersif bentuk paksaan atau kekerasan tidak langsung diterapkan, sehingga lebih mengutamakan pemberian ultimatum terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu. Karena mengedepankan ultimatum dan ancaman, diplomasi koersif ini membawa isu menjadi abu-abu dengan tidak ada sikap “memberi” dan “mengambil”.

*“Coercive diplomacy applies pressure in a manner and magnitude that seeks to persuade an opponent to cease aggression rather than bludgeon him into stopping...just enough force of an appropriate kind to demonstrate resolution and to give credibility to the threat that greater force will be used if necessary” (Jentleson, 2006)*

Diplomasi koersif menggunakan strategi dengan memberikan kekuatan dan tingkatan tertentu yang bertujuan untuk mengajak lawan menghentikan agresi. Dengan memberikan tekanan secukupnya untuk menunjukkan tujuan negara yang melakukan diplomasi (disebut sebagai *coercer state*) kepada negara yang menjadi sasaran (disebut sebagai *target state*), juga menunjukkan ancaman bahwa kekuatan yang lebih besar akan digunakan bila perlu. Imbalan dan ancaman yang digunakan dalam diplomasi ini mengikuti tuntutan dari *coercer state*. Saat *target state* memenuhi tuntutan *coercer state*, imbalan atau disebut juga *carrots* dapat diberikan. Namun sebaliknya apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka ancaman atau *sticks* akan digunakan pada *target state*. Diplomasi koersif dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila menggabungkan antara *carrots* dan *sticks*, maka *coercer state* harus memenuhi tiga kriteria aspek yaitu *proportionality*, *reciprocity*, dan *coercive credibility*.

*“A coercer state’s ability to tip this balance in its favor rests on its meeting three key criteria: proportionality, reciprocity, and coercive credibility”* (Jentleson, 2006).

### **3.1. Aspek *proportionality***

Aspek ini membahas mengenai hubungan antara lingkup, sifat, tujuan, serta kekuatan yang digunakan dalam upaya diplomasi koersif. *Coercer state* harus mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang harus digunakan untuk mendapatkan tujuannya. Dalam aspek ini masalah utama yang muncul adalah tentang pertarungan yang luar biasa dengan seruan untuk

perubahan rezim pada *target state*. Cukup sulit untuk memaksa perubahan dalam kebijakan negara, memaksa perubahan dalam sifat dan kondisi yang sudah menjadi bawaan target merupakan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Terlalu besar sumber daya bisa menyebabkan porsi ancaman yang besar sehingga berpotensi untuk perang. Terlalu sedikit sumber daya mengakibatkan upaya yang dilakukan bisa gagal sejak awal (Jentleson, 2006). Seperti yang dikatakan Bruce bahwa;

*“We don’t see a strict linear relationship by which the limited scope of objectives always boosts the chance of success, we do see the policy change/regime change differentiation as a crucial proportionality threshold”* (Jentleson, 2006)

Dalam konflik sengketa wilayah Kashmir pada tahun 2012-2018 ini dapat terlihat dengan adanya perbedaan dalam kepemimpinan kedua Perdana Menteri yang mengalami pergantian pada periode tahun penelitian. Dengan pergantian kedua Perdana Menteri tersebut memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga membawa dinamika hubungan kedua negara menjadi semakin kompleks. Perdana Menteri Manmohan Singh datang dari partai Indian National Congress (INC), memiliki kedekatan khusus dengan Kashmir karena partai INC pernah menduduki kursi kepemimpinan di Kashmir. Sehingga hubungan Kashmir dengan pemerintah India terjaga dengan baik, meskipun terjadi berbagai perselisihan namun hubungan India dan Pakistan cukup terjaga dengan baik. Sedangkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang datang BJP Hindu-nasionalis, cenderung lebih keras dan kurang pro dengan masyarakat Kashmir. Eskalasi konflik Kashmir sering

memuncak, hubungan India dan Pakistan juga tidak dalam kondisi yang lebih baik lagi. India banyak melakukan uji coba nuklir dan memperkuat militernya di Kashmir.

Dengan memiliki kekuatan yang lebih besar dan semakin meningkat dari negara lain akan membuat negara lebih percaya diri untuk bertahan dan bersaing. Nuklir menjadi salah satu bentuk pertahanan India dan Pakistan, sekaligus menjadi penyeimbang kekuatan kedua negara. Demi mencapai ambisinya untuk menguasai wilayah Kashmir, India pertama kali melakukan uji coba nuklir dengan nama “*Smiling Buddha*” pada 18 Mei 1974 di Pokhran (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 1974). Sejak saat itu, India berhasil mengembangkan nuklir dan selalu melakukan uji coba untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia.

Pada tahun 2012 India melakukan uji coba nuklir terbaru dan terbesarnya yaitu Agni V, rudal tersebut merupakan nuklir terbesar di India. Pertama kali India melakukan uji coba nuklir jarak pendek atau menengah Agni I pada Mei 1989, setelah itu rudal Agni berkembang sampai ke series V. Rudal Agni V ini disebut sebagai *Intercontinental Ballistic Missiles* (ICBMs) karena kekuatan hulu ledaknya bisa mencapai seluruh wilayah Asia, serta sebagian wilayah Afrika dan Eropa. Berbeda dengan series rudal Agni I – IV yang memiliki kemampuan jarak pendek atau menengah dengan jarak ledak antara 1.000 km – 4.000 km, untuk Agni V memiliki jarak ledak 5.500 km – 5.800 km. Terhitung 7 kali rudal Agni V di uji coba sejak 19 April 2012 dan terakhir pada 10 Desember 2018 (India Today, 2018).

Satu pekan kemudian pada tanggal 25 April 2012, Pakistan melakukan uji coba nuklir terbesarnya yaitu Hatf IV (Shaheen-1A). Rudal tersebut merupakan

senjata nuklir yang terbaru dan terbesar yang dimiliki Pakistan, namun kekuatannya hanya jarak menengah dengan maksimal 2.500 – 3.000 km dan mencakup keseluruhan wilayah India. Pakistan lebih sering melakukan uji coba nuklir daripada India, meskipun hanya rudal kecil namun sangat terlihat bahwa Pakistan ingin menggertak negara – negara yang berkonflik dengan Pakistan khususnya India (Global Security, 2016).

India dan Pakistan merupakan negara yang tidak menandatangani *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), sehingga keduanya selalu melakukan uji coba nuklir sebagai bentuk unjuk kekuatan nuklir mereka. India memiliki alasan untuk tidak menandatangani CTBT karena berbagai alasan; pertama, nuklir dianggap sebagai teknologi unggulan, sehingga bagi negara yang sudah memiliki nuklir mereka akan meningkatkan kekuatannya melalui uji coba lapangan dan simulasi laboratorium (Neog, 2016).

Kedua, untuk menghadapi kondisi bahaya yang tidak pasti dari Pakistan dan China, sehingga India akan terus meningkatkan kekuatan nuklirnya untuk mempertahankan *power* di kawasan (Neog, 2016).

Ketiga, dari birokrasi ilmiah dan keamanan India berpendapat jika menandatangani CTBT hanya akan menghambat kemajuan India, sehingga secara tegas India tidak akan menandatangani perjanjian yang dianggapnya *unequal treaty* (Neog, 2016).



Berikut merupakan data nuklir India berdasarkan laporan dari *Center for Strategic & International Studies*.



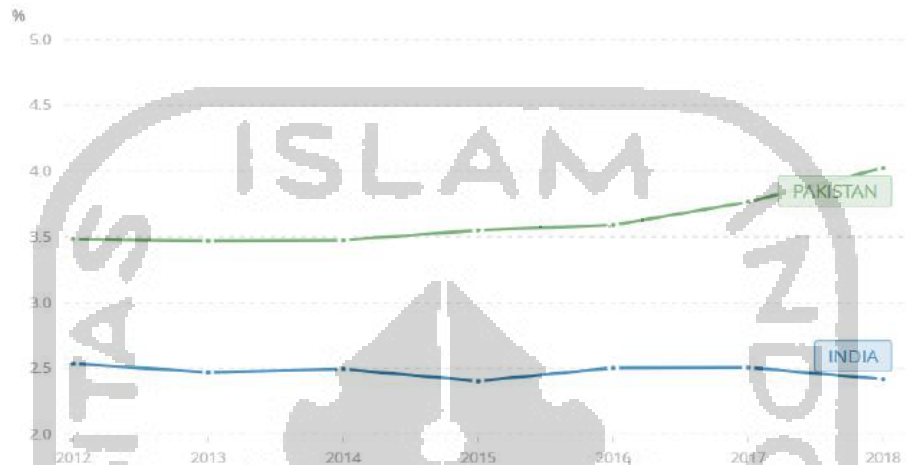
1. Prahaar. Nuklir dengan biaya terendah dan terhemat, serta memiliki hulu ledak sekitar 150 kilometer. Dengan kemampuan jangka ledaknya sampai pada Pakistan, terakhir kali diuji coba pada 20 September 2018 (Muhaimin, 2018)
2. Brahmos (*Cruise Missile*). Diproduksi dengan kerja sama India-Rusia, yang memiliki hulu ledak sekita 290 kilometer. Pertama kali diuji coba pada 25 Juni 2016 dan dapat ditembakkan dari darat, laut dan bawah laut (Berlianto, 2019).
3. Rudal Prithvi I. Nuklir pertama yang dikembangkan dalam program "India's nuclear deterrence" dengan hulu ledak sekitar 250 kilometer. Dengan ukuran yang kecil (panjang Sembilan meter dan diameter satu meter) membuatnya sulit

dikenali dalam satelit. Senjata ini telah dilakukan uji coba 3 kali pada tahun 2016 (Kristensen & Norris, 2017).

4. Rudal Agni 1. Mulai beroperasi pada 2007, dengan hulu ledak sekitar 700 kilometer. Pembuatan nuklir ini difokuskan untuk Pakistan sebagai target dan telah dilakukan uji coba 2 kali pada tahun 2016 (Kristensen & Norris, 2017).
5. Nurbhay (*Cruise Misile*). Mei 2013 pertama kali beroperasi namun mengalami kendala teknis dan berhasil uji coba pada 17 Oktober 2014. Dengan hulu ledak sekitar 1.000 kilometer dan dapat ditembakkan di darat, laut dan bawah laut (Muhaimin, 2014).
6. Rudal Agni 2. Memiliki hulu ledak lebih dari 2.000 kilometer dengan fokus penargetan pada Tiongkok bagian barat, tengah dan selatan. Nuklir series ini kemungkinan mengalami kendala teknis karena hanya satu kali tes pada 4 Mei 2017 dan dilaporkan gagal (Kristensen & Norris, 2017).
7. Rudal Agni 3. Dengan hulu ledak lebih dari 3.2000 kilometer bisa menjangkau Pakistan dan Tiongkok sekaligus, telah diuji coba 4 kali dan terakhir kali pada 27 April 2017 dari pulau Abdul Kalam, pantai timur India (Kristensen & Norris, 2017).
8. Rudal Agni 4. Dengan hulu ledak antara 3.500 – 4.000 kilometer dan bisa menjangkau keseluruhan wilayah Tiongkok. Uji coba pertama pada tahun 2014 dan yang kedua pada 2 Januari 2017 (Kristensen & Norris, 2017).
9. Rudal Agni 5. Nuklir terbesar yang dimiliki India dengan hulu ledak lebih dari 5.000 kilometer dan menjangkau seluruh wilayah Asia, serta sebagian wilayah

Eropa dan Afrika. Series ini sudah diuji coba 7 kali sejak 19 April 2012 dan terakhir pada 10 Desember 2018 (Kristensen & Norris, 2017).

Grafik pengeluaran militer India dan Pakistan tahun 2012-2018



Sumber: (The World Bank, 2019)

Selain nuklir, India juga membangun pertahanannya, karena militer merupakan salah satu elemen terpenting dalam pertahanan setiap negara terlepas dari negara tersebut berkonflik atau tidak. Dalam data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kenaikan yang tinggi dalam pembangunan militer India. Berbeda dengan Pakistan yang memiliki tingkat pembangunan militer yang tinggi untuk menyeimbangkan kekuatan dengan India.

Data pembelian helikopter militer oleh Indian Air Force (IAF) tahun 2012.

Heavy lift helicopters	15	CH-47 Chinook
Medium attack helicopters	22	AH-64 Apache
Utility twin-engine helicopters	159	HAL (Dhruv Mk III)
Naval twin-engine helicopters	50	Global market
Naval medium, multi-role	91	Global market
Weaponised utility helicopter	76	HAL (Rudra)
Light Combat Helicopter	179	HAL (LCH)
Light Utility Helicopters	197	Global market
Light Utility Helicopters	187	HAL

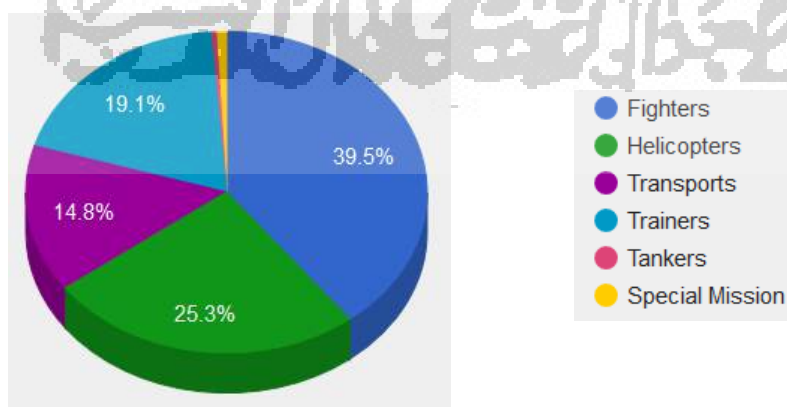
Sumber: Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)

Pada tahun 2012 pemerintah India membeli helikopter militer secara besar-besaran. Sesuai dengan data diatas pembelian helikopter militer oleh IAF terbagi dalam 10 jenis. Pertama, 139 unit helikopter Mi-17 V-5 *medium lift* Rusia dengan alokasi dana sekitar 2,4 miliar US dolar dan dapat mengangkut kurang lebih 26 tentara serta perlengkapan perang. Kedua, 15 unit helikopter kelas berat amerika CH-47 Chinook yang dibuat oleh Boeing dan telah digunakan Amerika di berbagai macam pertempuran seperti di Irak dan Afghanistan, serta daya angkut 50 tentara lengkap dengan alat tempur sebsar 12,7 ton. Ketiga, 22 unit helikopter medium AH-64 Apache buatan Boeing, dengan daya serang yang kuat didukung dengan meriam, roket & rudal anti tank sehingga mampu memenangkan pertempuaran. Keempat, 159

unit helikopter utilitas Dhruv Amrk III yang dibuat oleh Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) dan alat ini dibutuhkan untuk seluruh militer India seperti Angkatan Darat, Angkatan Udara, penjaga pantai. Kelima, 50 helikopter ringan bermesin ganda dari Agusta Westland, sebagai cadangan apabila helikopter Dhruv mengalami kendala ketika digunakan. Keenam, 91 unit helikopter multifungsi dari tender global untuk menggantikan helikopter vintage sea king, yang terbang dari kapal frigate besar dan kapal perusak. Ketujuh, 76 unit helikopter Dhruv yang merupakan versi senjata berat dilengkapi peralatan elektronik perang yang lengkap termasuk meriam, roket pods, serta rudal anti tank. Kedelapan, 179 helikopter tempur ringan yang diproduksi oleh HAL yang beratnya 5,5 ton dengan kemampuan lepas landas 10.000 kaki, senjata roket hingga 16.300 kaki dan rudal terbang di atas 21.000 kaki. Kesembilan, 197 helikopter ringan dari tender global. Kesepuluh, 187 helikopter ringan yang diproduksi oleh HAL (Syah, 2012).

Militer India merupakan terkuat nomor dua di Asia dan nomor empat di dunia. Dengan personel mencapai 3.462.500 yang terdiri dari 1,36 juta personel aktif dan 2,1 juta personel cadangan (India Military Strength, 2019). Terbagi sebagai berikut:

- Angkatan Udara



*“Total Aircraft Strength, 1.666 (ranked 4 of 137). Fighters 658 (ranked 4 of 137). Transport 247 (ranked 3 of 137). Trainers 318 (ranked 6 of 137). Helicopters Strength 422 (ranked 5 of 137). Tankers 7. Special Mission 14” (Indian Air Force, 2020).*

- Angkatan Darat

*“Combat Tanks, 4.148 (ranked 6 of 137). Armored Fighting Vehicles, 2.815 (ranked 25 of 137). Self-Propelled Artillery, 200 (ranked 26 of 137). Towed Artillery, 4.060 (ranked 4 of 137). Rocket Projectors, 266 (ranked 14 of 137)” (India Military Strength, 2019).*

- Angkatan Laut

*“295 total Naval Assets. 1 Aircraft Carriers. 13 Frigates. 11 Destroyers. 22 Corvettes. 16 Submarines. 139 Patrol Vessels. 1 Mine Warfare.” (India Military Strength, 2019)*

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa intensitas nuklir dari tahun 2012-2018 sangat tinggi. Dengan perubahan dinamika politik domestik dan internasional mendorong India untuk terus memperkuat dirinya menjadi semakin *powerful*.

**3.2. Aspek reciprocity**

*“Reciprocity involves an explicit or at least mutually tacit understanding of linkage between the coercer’s carrots and the target’s concessions. At every key step, both sides must believe they are getting “something for something” rather than “nothing for something” (Jentleson, 2006).*

Dalam aspek ini *coercer state* harus bisa meyakinkan *target state* bahwa ketika kepentingan mereka terpenuhi maka akan diberikan *carrots* sebagai imbalan untuk *target state*. Upaya ini biasanya dilakukan oleh *coercer state* secara bertahap atau secara langsung dengan cukup kuat dan jelas tentang apa yang diinginkan dari pihak target sehingga target akan berpikir bahwa hal tersebut menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Namun hal sebaliknya akan terjadi apabila pihak target tidak yakin bahwa upaya tersebut dapat menguntungkan mereka, bisa jadi akan menjadi sangat merugikan dan meminta pengembalian konsesi. Sehingga pada intinya kepercayaan harus dibangun dengan kuat agar mampu meyakinkan pihak target dan *carrots* menjadi salah satu elemen penting untuk dipertimbangkan pihak target (Jentleson, 2006).

Konflik Kashmir berawal dari konflik politik kekuasaan antara penguasa Kashmir dan pemerintah India, sehingga sangat penting peran politik untuk menyelesaikan masalah Kashmir. Perasaan benci, salah paham, dan ketidakpercayaan semakin dipupuk setiap hari, baik masyarakat ataupun pemerintah India dan Pakistan. Masyarakat Kashmir hanya ingin mendapatkan kebutuhan dasar yang menjadi hak dan kewajiban hidupnya seperti keadilan & kesetaraan dalam beribadah, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka berdemonstrasi untuk menyuarkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta menuntut resolusi yang telah dijanjikan oleh Mahatma Gandhi untuk memberikan kebebasan Kashmir dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun sayangnya konflik menjadi kompleks dan terlihat seolah masyarakat Kashmir melawan pemerintah India, sehingga

pemerintah India selalu meningkatkan jumlah militernya dan tidak terhitung dalam melanggar garis LoC sejak 1989 hingga kini (Tabassum, 2012).

Perdana Menteri India pertama, Mahatma Gandhi memberikan kebijakan berupa otonomi khusus kepada Negara Bagian India. Tertuang dalam *article 370* yang berjudul “*Temporary, Transitional, and Special Provisions*”, yang digunakan sebagai dasar kebijakan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan *privilege* wilayah Kashmir. Hak istimewa yang diatur dalam *article 370* ada 94 item diantaranya seperti; otonomi wilayah, konstitusi, kepemilikan properti, kewarganegaraan, hak-hak dasar, dan lain sebagainya. Kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi tetap menjadi wewenang pemerintah India (Mustafa, 2019).

Diakhir kepemimpinan Perdana Menteri Manmohan Sigh kondisi hubungan India dan Pakistan kembali terjalin dengan baik. Perdana Menteri Manmohan Sigh dan Perdana Menteri Nawaz Sharif bertemu di New York dalam acara United Nations General Assembly tahun 2013. Keduanya sepakat untuk menghentikan segala serangan yang terjadi dan menjaga kondisi perdamaian kedua negara dengan kerja sama dan penguatan batas *Line of Control*. Setelah Manmohan Sigh berakhir jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Narendra Modi, situasi kedua negara berubah termasuk konflik Kashmir yang berkepanjangan.

Pada tahun 2002 terjadi kerusuhan anti muslim di Gujarat dengan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Ketika itu Narendra Modi sebagai gubernurnya dan negara-negara barat banyak memboikot aksi tersebut. Ketika pemilu 2014



Narendra Modi yang berasal dari BJP partai Hindu nasionalis menang telak sebagai Perdana Menteri India.

Narendra Modi merupakan orang yang terkenal tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Pada tahun 2014 setelah Narendra Modi terpilih menjadi Perdana Menteri dan memberikan sambutan kepada masyarakat Kashmir bahwa;

*“My message to the people of Jammu and Kashmir is that the government wants to carry forward former prime minister Atal Bihari Vajpayee’s plan in the state. My aim is to win the hearts of the people of the state. Democracy (Jamhuriyat), humanity (Insaniyat) and Kashmiriyat, these words of Atal ji have made special place in the hearts of Kashmiris and have ignited a hope in every Kashmiri youth about better future”* (Bukhari, 2015).

Pada tahun 2018 BJP yang merupakan partai politik terbesar di India yang memutuskan aliansi dengan PDP yang sebelumnya berkoalisi sejak 2016. Dengan putusannya aliansi kedua partai tersebut, PDP kehilangan kendalinya di Kashmir dan BJP mendesak pemerintah Kashmir untuk mengembalikan kuasa atas wilayah Kashmir kepada pemerintah India karena tidak mampu membangun Kashmir menjadi lebih baik. Perwakilan dari BJP menyampaikan bahwa:

*“Basically, keeping in mind the larger national interest of India’s integrity and security, in order to bring control over the situation prevailing in the state, we have decided that it is time the reins of power be handed over to the state governor”* (Miglani, 2018)

Geopolitik yang dinamis dan fluktuatif, tergantung pada kepentingan para aktor. Setelah BJP menarik aliansi dari PDP dan mendesak Gubernur Kashmir Mehbooba Mufti untuk mengundurkan diri, seketika kondisi Kashmir menjadi kacau termasuk hubungan India dan Pakistan yang memuncak. Pada intinya memang India tidak akan pernah melepaskan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya dan akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankannya.

Janji yang dikatakan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menegakkan demokrasi dan kemanusiaan di Kashmir belum terlihat pembuktiannya. Dibawah kepemimpinan Narendra Modi dalam konflik Kashmir banyak menggunakan upaya *hard power* dan konflik semakin kompleks. Seperti KTT SAARC tahun 2016 dibatalkan karena hubungan India dan Pakistan memanas, BJP menarik aliansi dari PDP yang sebelumnya beraliansi sejak 2014, dan berakhir pada pengunduran diri *Chief Minister of Jammu and Kashmir* Mehbooba Mufti sehingga pemerintah India mengambil alih kekuasaan Kashmir.

Kerja sama pertandingan olahraga kriket yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, sebagai salah satu upaya untuk menjalin hubungan baik antara India dan Pakistan. Kedua negara tersebut selalu terlihat jelas bersaing dalam pertandingan, sehingga seolah terlihat seperti perang tanpa baku tembak. Banyak pihak yang mengharapkan dengan adanya kerja sama dari olahraga ini dapat membawa dampak positif untuk perdamaian kedua negara, sehingga kedua negara akan menaruh rasa saling percaya dan terjalin diplomasi serta kerja sama di berbagai bidang lainnya (Pasricha, 2012).

### 3.3. Aspek *coercive credibility*

*“Coercive credibility means that in addition to the running calculations comparing the costs and benefits of cooperation, the target knows that a definitive refusal to cooperate would have serious consequences”* (Jentleson, 2006).

Aspek ini membentuk elemen intimidasi *coercer state* kepada *target state*, karena apabila terjadi penolakan maka akan memiliki konsekuensi yang serius. Sehingga elemen intimidasi dibentuk dengan menempatkan posisi pihak target tidak memiliki pilihan lain selain menjalin kerja sama dengan *coercer state* meskipun telah menghitung kalkulasi untung ruginya (Jentleson, 2006).

Perdana Menteri Narendra Modi membatalkan sebagian besar pertemuan bilateral kedua negara, baik melalui KTT SAARC ataupun UN. Pada awal periode Perdana Menteri Narendra Modi mengundang Presiden Pakistan ke India untuk menjalin hubungan baik secara bilateral, namun India mendadak membatalkan pertemuan tersebut karena hubungan keduanya memuncak atas perselisihan konflik Kashmir (BBC News, 2014).

Pada tahun 2016 terjadi baku tembak di LoC antara tentara India dan Pakistan. India mengancam Pakistan bahwa

*“We need to cripple them, we need to bring them down on their knees. Pakistan is one-fifth the size of India. If we fire even a part of our arsenal, most of it will be on the Pakistani Punjab, from*

*where the Pakistani army comes: Not a crop will grow there for 800 years! Lets stop self-dettering ourselves” (Mian, 2016).*

India selalu merespon dengan cepat setiap saat terjadi perselisihan dengan Pakistan, baik secara militer, nuklir, maupun memutuskan kerja sama. Pada kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi KTT SAARC selalu tertunda dikarena hubungan India dan Pakistan yang tidak dalam kondisi yang baik, selain itu uji coba nuklir telah dilakukan berkali-kali sebagai upaya unjuk kekuatan India terhadap musuhnya.

Sungai Indus yang mengalir ke India dan Pakistan melalui Kshmir juga menjadi salah satu pelengkap yang dipersengketakan. Ketika September 2016 India mengumumkan akan mempercepat pembangunan bendungan, hal ini tentu akan menghambat perairan sungan di Pakistan. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa *“blood and water cannot flow together”*, lalu direspon oleh Pakistan bahwa, pencabutan perjanjian dapat dianggap sebagai *“act of war”* (Mian, 2016).

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kondisi alamiah wilayah Kashmir yang sangat menarik, menjadi pemicu bagi siapapun untuk mengunjungi dan mampu menguasai. Terletak di kaki Gunung Himalaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan pemandangan yang indah. Besar potensi untuk dimanfaatkan dan mampu meningkatkan ekonomi India, namun besar juga potensi untuk menyebabkan konflik perebutan wilayah antar negara perbatasan.

Ketika Inggris membagi kedua wilayah jajahannya sebagai India dan Pakistan dengan pembagian yang tidak adil sehingga menimbulkan konflik hingga saat ini. Kashmir merupakan salah satu konflik internasional yang masih belum selesai sejak tahun 1947. Kashmir terletak di perbatasan wilayah India dan Pakistan, sehingga kedua negara memiliki wilayah Kashmir yang terbagi menjadi 2 teritori. Penduduk Kashmir mayoritas beragama Islam, namun Kashmir bagian India dipimpin oleh Maharaja Harry Sigh yang beragama Hindu dan menjualnya kepada pemerintah India.

India yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dan Pakistan diwakilkan oleh Presiden Zulfikar pada tahun 1972 membentuk perjanjian "*Simla Agreement*" yang berisi perjanjian kesepakatan *Line of Control* sebagai batas wilayah kedua negara dalam menguasai wilayah Kashmir.

Pakistan merasa tidak terima dengan sebagian wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India dan masyarakat Kashmir juga merasa keberatan apabila bergabung dengan India, karena secara spiritual dan budaya lebih dekat dengan Pakistan. Konflik yang berkepanjangan menjadi salah satu isu internasional dan masuk dalam agenda pembahasan UN, sehingga menjadi salah satu resolusi yang diratifikasi oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1949 Jammu, Kashmir, dan Ladakh sebagai wilayah dari negara bagian India yang memiliki otonomi sendiri dan diatur dalam Pasal 370 dan *article* 35A. Pasal 370 menjelaskan bahwa Kashmir berhak menentukan bendera dan konstitusinya sendiri kecuali urusan militer dan luar negeri. Sedangkan *article* 35A memperjelas hak bagi orang diluar Kashmir dilarang menetap secara permanen, menduduki jabatan pemerintahan, mendapatkan beasiswa, dan untuk perempuan yang menikah dengan lelaki dari luar Kashmir maka akan dicabut hak kepemilikannya sampai anak turunya.

Konflik Kashmir dalam karya tulis ini dianalisis menggunakan teori diplomasi koersif. Tahun penelitian yang dimulai dari 2012 yang dilatarbelakangi oleh India pertama kali uji coba nuklir terbesarnya yaitu Agni V. Konflik yang kompleks membuat hubungan kedua negara fluktuatif, sehingga selain upaya *hard power* dan *soft power* telah dilakukan kedua negara.

Diplomasi koersif India terbagi kedalam aspek *proportionality*, aspek *reciprocity*, dan aspek *coercive credibility*. Nuklir India tersedia lengkap dengan 9 series. Militer India merupakan terkuat nomor 2 di Asia dan nomor 4 di dunia, serta lengkap dengan segala jenis senjatanya. Geopolitik India yang dinamis baik secara domestik maupun internasional mendorong menjadi faktor utama konflik menjadi

fluktuatif. Terkadang hubungan baik bisa terjalin dengan kerja sama atau pertandingan olah raga, namun ketika ketegangan hubungan kedua negara terjadi maka nuklir dan militer menjadi senjata utama India yang mampu mengancam Pakistan.

Pada tahun 2019 konflik Kashmir semakin kompleks, pemerintah India mencabut hak istimewa wilayah Kashmir. Otonomi Jammu dan Kashmir yang sebelumnya terdiri dari 3 wilayah Jammu, Kashmir dan Ladakh, kini terbagi menjadi 2 wilayah teritori negara bagian India, Jammu dan Kashmir, serta Ladakh secara terpisah. Bersamaan dengan dicabutnya hak istimewa Kashmir, pemerintah India juga menghapus pasal 370 dan *article* 35A. Hal ini banyak mendapat kecaman dari dunia internasional, karena sangat merugikan masyarakat Kashmir dan membawa kabar buruk untuk masa depan Kashmir. Hubungan India dan Pakistan juga kembali memuncak atas panjang yang berjalan seiring dengan sejarah terbentuknya kedua negara.

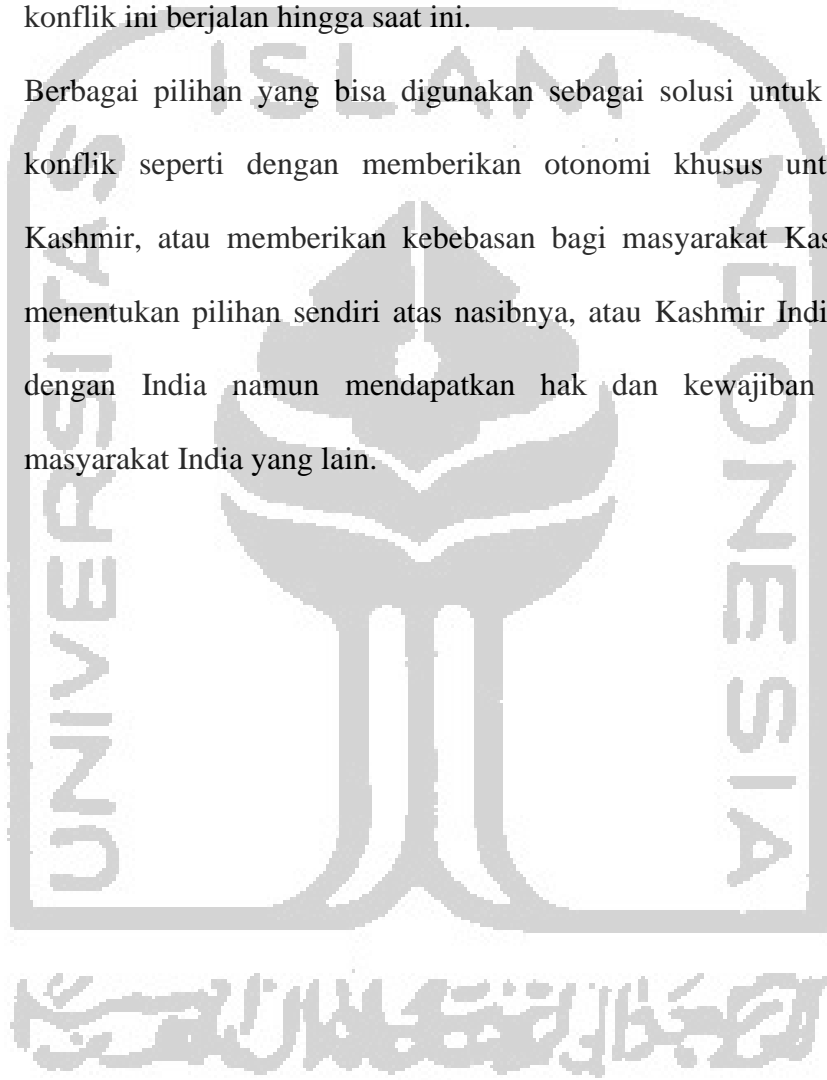
#### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam diplomasi koersif tentu terdapat 2 aktor yaitu *coercer state* dan *target state*. Tentu kedua actor memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda, sehingga sebaiknya kedua aktor dapat mempertimbangkan

segala kondisi dan resiko sebelum mengambil kebijakan atau *sticks and carrots*..

2. Diharapkan kedua negara mampu untuk mengakhiri konflik, karena banyak korban yang meninggal serta pelanggaran hak asasi manusia sejak konflik ini berjalan hingga saat ini.
3. Berbagai pilihan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengakhiri konflik seperti dengan memberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir, atau memberikan kebebasan bagi masyarakat Kashmir untuk menentukan pilihan sendiri atas nasibnya, atau Kashmir India tergabung dengan India namun mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya masyarakat India yang lain.





## DAFTAR PUSTAKA

### Berita :

- Ashiq, P. (2019, Agustus 5). *Omar Abdullah, Mehbooba Mufti placed under house arrest; Section 144 imposed in Srinagar*. Retrieved Desember 12, 2019, from The Hindu: <https://www.thehindu.com/news/national/omar-abdullah-mehbooba-mufti-placed-under-house-arrest-section-144-imposed-in-srinagar/article28816384.ece>
- BBC. (2012, April 19). *India Berhasil Luncurkan Rudal Jarak Jauh*. Retrieved Mei 14, 2019, from BBC Indonesia: [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120419\\_indiamisile](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120419_indiamisile)
- Berlianto. (2019, November 29). *India Sukses Uji Coba Rudal Supersonik BrahMos di Laut Arab*. Retrieved Januari 7, 2020, from International Sindo News: <https://international.sindonews.com/read/1463532/40/india-sukses-uji-coba-rudal-supersonik-brahmos-di-laut-arab-1574961269>
- Bukhari, S. (2015, Mei 29). *Kashmir in Modi's first year*. Retrieved Januari 7, 2020, from The Friday Times: [https://www.thefridaytimes.com/kashmir-in-modis-first-year/?\\_cf\\_chl\\_captcha\\_tk\\_\\_=acde41ca5b4264abe38416fd9f592e9f975c710f-1578397451-0-AWQSHES6-DSkCrAKwfeUMaPSXnkErQ10RCQhWyI4CaD\\_KTuMZ\\_TvOyZy11U7IRssrNMoi6RQAN-QwKtVDAUas8NoUtLDBKrOr700dSxSzLfyGOmxCj09Vqi](https://www.thefridaytimes.com/kashmir-in-modis-first-year/?_cf_chl_captcha_tk__=acde41ca5b4264abe38416fd9f592e9f975c710f-1578397451-0-AWQSHES6-DSkCrAKwfeUMaPSXnkErQ10RCQhWyI4CaD_KTuMZ_TvOyZy11U7IRssrNMoi6RQAN-QwKtVDAUas8NoUtLDBKrOr700dSxSzLfyGOmxCj09Vqi)

Fareed, R. (2018). *Kashmir: Mehbooba Mufti resigns after BJP withdraws support*. Srinagar: Al Jazeera

IANS. (2015). *'Bajrangi Bhaijaan': Triumph of brotherhood across borders*. New Delhi: Indian Express.

*India plans massive hiring drive for govt workers in Kashmir*. (2019, Agustus 29). Retrieved Januari 2, 2020, from AP News: <https://apnews.com/31087d131bc84c39badabd7b29bb47b3>

Indonesia, B. (2012). *India berhasil meluncurkan rudal jarak jauh*. Jakarta: BBC Indonesia.

Indonesia, B. (2014). *Modi dilantik menjadi PM baru India*. Jakarta: BBC Indonesia.

Indonesia, C. (2014). *Hubungan India-Pakistan Kembali Memanas*. Jakarta: CNN Indonesia.

Jayanth, J., & Anil, G. (2016). *Saarc summit collapses after India and three other members pull out*. India: Hindustan Times.

*Kashmir special status explained: What are Articles 370 and 35A?* (2019, Agustus 5). Retrieved Desember 12, 2019, from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2019/08/kashmir-special-status-explained-articles-370-35a-190805054643431.html>

*Rusia, India tingkatkan kerja sama militer.* (2012, Desember 24). Retrieved from  
BBC News:

[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121224\\_rusia\\_india\\_militer](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121224_rusia_india_militer)

*Setelah India, Giliran Pakistan Uji Coba Rudal Nuklir.* (2012, April 25). Retrieved

Mei 22, 2019, from Detik News:

[https://news.detik.com/internasional/1901280/setelah-india-giliran-pakistan-  
uji-coba-rudal-nuklir?9922022](https://news.detik.com/internasional/1901280/setelah-india-giliran-pakistan-uji-coba-rudal-nuklir?9922022)

Media Indonesia. (2015, Oktober 26). *Status Baru Jammu dan Kashmir.* Retrieved

Mei 11, 2019, from Media Indoneisa:

[https://mediaindonesia.com/read/detail/8435-1947-status-baru-jammu-  
dankashmir](https://mediaindonesia.com/read/detail/8435-1947-status-baru-jammu-dankashmir)

Miglani, S. (2018, Juni 19). *Withdrawal of India's BJP from Kashmir government  
could herald 'muscular policy'.* Retrieved Januari 7, 2020, from Reuters:

[https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir/indias-bjp-pulls-out-of-  
ruling-alliance-in-disputed-kashmir-idUSKBN1JF11T](https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir/indias-bjp-pulls-out-of-ruling-alliance-in-disputed-kashmir-idUSKBN1JF11T)

Muhaimin. (2014, Oktober 17). *Saingi Tomahawk AS, India Jajal Rudal Canggih*

*Nirbhay.* Retrieved Januari 7, 2020, from Sindo News internasional:

[https://international.sindonews.com/read/912610/40/saingi-tomahawk-as-  
india-jajal-rudal-canggih-nirbhay-1413551059](https://international.sindonews.com/read/912610/40/saingi-tomahawk-as-india-jajal-rudal-canggih-nirbhay-1413551059)

Muhaimin. (2018, September 21). *India Tes Rudal Prahaar, Penetralisir Rudal*

*Nuklir Taktis Pakistan.* Retrieved Januari 7, 2020, from International Sindo

News: <https://international.sindonews.com/read/1339998/40/india-tes-rudal-prahaar-penetralsisir-rudal-nuklir-taktis-pakistan-1537479187>

Muni, S. (2014). *A disappointing SAARC summit*. New Delhi: Al Jazeera.

Mustafa, F. (2019, Agustus 6). *Explained: What are Articles 370 and 35A?*

Retrieved November 17, 2019, from Indian Express:

<https://indianexpress.com/article/explained/understanding-articles-370-35a-jammu-kashmir-indian-constitution-5610996/>

Neog, R. (2016). *CTBT at 20: Why India Won't Sign the Treaty*. New Delhi: South Asian Voices.

P, P. (2013). *Narendra Modi attacks Manmohan for talking to Nawaz Sharif in spite of fresh attacks by Pakistan-backed groups*. New Delhi: India today.

Pasricha, A. (2012, Desember 28). *India - Pakistan Memulai Lagi Diplomasi*

*Melalui Kriket*. Retrieved Mei 11, 2019, from VOA Indonesia:

<https://www.voaindonesia.com/a/india-pakistan-memulai-lagi-diplomasi-melalui-kriket/1573479.html>

Pathak, P. (2019). *Hasil Pemilu India: Partai dengan 'sosok kuat' PM petahana*

*Narendra Modi menang mutlak*. New Delhi: BBC Indonesia.

Rashid, H. I. (2019, Oktober 18). *Jammu & Kashmir Legislative Council Abolished*.

Retrieved Januari 2, 2020, from Economic Indian Times:

<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/jammu-kashmir-legislative-council-abolished/articleshow/71637205.cms?from=mdr>

Safi, M. (2017). *Attack by militants kills at least seven Hindu pilgrims in Kashmir*.  
Delhi: The Guardian.

Sari, A. P. (2016). *Kondisi Memanas, Pakistan Evakuasi Ribuan Warga dari Kashmir*. Jakarta: CNN Indonesia.

Syah, E. (2012, Juni 18). *Pembelian Helikopter Militer Besar-Besaran oleh India*.  
Retrieved Januari 5, 2020, from Artileri:  
<https://www.artileri.org/2012/06/pembelian-helikopter-militer-besar.html>

Today, I. (2015). *15 highlights of PDP-BJP government agenda in Jammu and Kashmir*. New Delhi: India Today.

Uniyal, P. L. (2018). *BJP ends alliance with PDP, pulls out*. New Delhi: Kashmir Times.

Walsh, D. (2013, September 29). *India and Pakistan Talk, but Tensions Are High*.  
Retrieved Juni 26, 2019, from New York Times:  
<https://www.nytimes.com/2013/09/30/world/asia/indian-and-pakistani-leaders-meet-in-new-york.html>

York, A. P. (2013). *Indian and Pakistani PMs meet in New York in shadow of Kashmir violence*. New York: The Guardian.

**Buku:**

Dugis, V., & Dharmaputra, R. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-perspektif klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).

Karim, M. F. (2019). *Memahami Pendekatan Kritis Dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. Depok: Penerbit Kepik.

Mashad, D. (2004). *Kashmir: Derita yang Tak Kunjung Usai*. Jakarta: Khalifa.

Sitepu, S. K. (2017). Film Bajrangi Bhaijaan Sebagai Media Diplomasi Publik India Terhadap Pakistan. *Thesis from University of Lampung*, 50.

Robert, J., & Georg, S. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widyawati, L. (2010). Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnya. *Thesis From UMY*, 4.

**Journal :**

Bendel, T. R. (1994). *On the types of balancing behaviour*. California: Naval Postgraduate School.

Cheema, M. J. (2015). Pakistan - India Conflict with Special Reference to Kashmir. *South Asian Studies*, 47.

Elkin, J. F., & Ritezel, W. A. (1986). The Indo-Pakistani Military Balance. *Asian Survey*, 533.

Hau, K. S., Ravichandran, M., & Guido, B. (2013). The Genesis of Kashmir Disputes. *Canadian Center of Science and Education*, 163.

Jentleson, B. (2006). Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World. *Policy Analysis Brief*, 2.

Kurr, N. (2015). Solutions to the Conflict in Kashmir. *International Research Scape*, 3-7.

Kristensen, H. M., & Norris, R. S. (2017). Indian Nuclear Forces, 2017. *Bulletin of The Atomic Scientists*, 207.

Mason, S. (2016). *Military Budgets in India and Pakistan: Trajectories, Priorities, and Risks*. Washington DC: Stimson Center .

Rizky, A. (2016). Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India - Pakistan Periode 2011 - 2013. *Journal Online Mahasiswa* 3(2), 1-13.

Tabassum, M. T. (2012). Political Situation In Kashmir and Role of United Nations . *Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus* Vol. 1(2), 22.

**Report :**

(2019). *About Jammu and Kashmir: Information on Tourism, Industries, Economy & Geography* . New Delhi: India Brand Equity Foundation.

(2019). *Military Expenditure Database 1998 - 2018*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

**Website :**

18 May 1974 - *Smiling Buddha*. (1974, Mei 18). Retrieved from Comprehensive

Nuclear-Test-Ban

Treaty

Organization:

<https://www.ctbto.org/specials/testing-times/18-may-1974-smiling-buddah>

*India Military Strength*. (2019, Agustus 13). Retrieved Januari 7, 2020, from Global Fire Power: [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=india](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=india)

*Indian Air Force*. (2020, Januari 8). Retrieved Januari 8, 2020, from World Directory of Modern Military Aircraft: <https://www.wdmma.org/indian-air-force.php#specialmission>

SAARC. (1985, Desember 8). *About SAARC*. Retrieved September 15, 2019, from South Asian Association for Regional Cooperation: <http://saarc-sec.org/about-saarc>

*Shaheen-I / Eagle-I / Hatf-IV* . (2016, April 14). Retrieved November 6, 2019, from Global Security: <https://www.globalsecurity.org/wmd/world/pakistan/hatf-4.html>

*Simla Agreement July 2, 1972*. (1972, July 1). Retrieved November 27, 2019, from Ministry of External Affairs Government of India: <https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?19005/Simla+Agreement+July+2+1972>